



LITERASI KEUANGAN DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENDUKUNG PEREKONOMIAN

Ukhti Ciptawaty¹, Heru Wahyudi², Thomas Andrian³, Driya Wiryawan⁴, Moneyzar Usman⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

ukhti.ciptawaty@feb.unila.ac.id¹, heru.wahyudi@feb.unila.ac.id², thomas.andrian@feb.unila.ac.id³,

driya.wiryawan@feb.unila.ac.id⁴, moneyzar.usman@feb.unila.ac.id⁵

Dikumpulkan: 10 Juli 2023; Diterima: 15 Juli 2023; Terbit/Dicetak: 30 Juli 2023

<https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.26>

Abstract: *Kurungan Nyawa Village in Pesawaran District shows signs of weakness in BUMDes management. The implementation of BUMDes in Kurungan Nyawa Village is constrained by three main problems, namely economic, social, and human potential issues. Academics who can help improve the management and administration of BUMDes business units that are not producing at peak production levels, even in a state of suspended animation, can help solve three problems faced by BUMDes in Kurungan Nyawa Village, Pesawaran Regency.*

Copyright © 2023, BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | FEB-UNILA

Keywords: BUMDes, Literasi Keuangan, UMKM

***Corresponding author:**

Ukhti Ciptawaty
Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.
1 Gedungmeneng Bandar Lampung
35145 Indonesia

Email:
ukhti.ciptawaty@feb.unila.ac.id

Abstrak: Desa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tanda-tanda kelemahan pengelolaan BUMDes. Penyelenggaraan BUMDes di Desa Kurungan Nyawa terkendala oleh tiga persoalan utama yaitu persoalan ekonomi, sosial, dan potensi manusia. Kalangan akademisi yang dapat membantu meningkatkan pengelolaan dan penatausahaan unit usaha BUMDes yang tidak berproduksi pada tingkat produksi puncak, bahkan dalam keadaan mati suri, dapat membantu menyelesaikan tiga persoalan yang dihadapi BUMDes di Desa Kurungan Nyawa Kabupaten Pesawaran.

PENDAHULUAN

Sistem terapan desentralisasi pasca reformasi 1998 melalui otonomi daerah di memunculkan persoalan baru. Istilah-istilah yang biasanya diyakini mengandung arti "raja-raja kecil" itu lahir sebagai akibat tanggung jawab pemerintah daerah untuk menumbuhkan ekonomi dan mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu, desentralisasi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat memiliki efek sebaliknya dari apa yang dimaksudkan. Kesenjangan ekonomi semakin lebar. Kenaikan Gini Ratio yang berkelanjutan untuk tahun ini berfungsi sebagai petunjuk visual untuk hal ini. Menurut data Badan Pusat Statistik, indeks gini perdesaan saat ini adalah 0,313, lebih rendah dari indeks gini perkotaan, yaitu 0,409.

Pemerintah kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa. Yurisdiksi ini tidak terbatas pada pengelolaan pemerintahan desa itu sendiri. Di dalam Pemerintah Kota telah menetapkan sumber-sumber keuangan yang sesuai dengan undang-undang untuk melaksanakan semua kekuasaan tersebut, yang didasarkan pada hak-hak yang didasarkan pada adat dan asal usul desa. Namun demikian, selain itu, pemerintah desa sendiri memiliki kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat desa, salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Achir & Imran (2022).

Pemerataan merupakan hal penting di setiap tingkat pemerintahan dalam konteks pertumbuhan nasional, khususnya di tingkat desa, yang dianggap sebagai cikal bakal berdirinya negara ini. Alda Rifada Rizki (2019) mengkaji bagaimana keberadaan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMDes) dibutuhkan. Dalam konteks pembangunan nasional, tentunya diperlukan pemerataan di semua tingkatan pemerintahan, khususnya Pemerintahan di tingkat desa dipandang sebagai cikal bakal berdirinya bangsa ini. Kehadiran pemerintahan desa kembali menarik perhatian dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rakyat.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah desa oleh undang-undang ini merupakan bukti bahwa desa sebagai unit terkecil masyarakat berupaya memajukan kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya. Kewenangan pemerintah desa meliputi kekuasaan untuk melaksanakan pembangunan desa, menghidupi masyarakat desa,, memberikan kekuasaan lebih kepada masyarakat desa dan tidak hanya terfokus pada pelaksanaan pemerintahan desa. Munawar (2011). Menurut undang-undang, pemerintah desa diberikan sumber anggaran yang ditentukan untuk melaksanakan semua tanggung jawab ini berdasarkan asal-usul lokal dan hak adat. Namun di samping itu, Pemerintah desa memiliki keleluasaan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat desa,

salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah desa diberikan kekuasaan melalui undang-undang ini menunjukkan bagaimana desa sebagai unit terkecil dari masyarakat bekerja untuk memajukan bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah desa memiliki kapasitas untuk melakukan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di samping menyelenggarakan pemerintahan desa. Penelitian Munzir (2020) bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama pengelolaan BUMDes. Potensi masing-masing dusun akan berbeda-beda, begitu juga dengan permasalahan yang akan dihadapi nantinya. Ada lebih dari 74 ribu desa di Indonesia, lebih dari 32 ribu di antaranya dianggap sebagai pemukiman tertinggal. Tujuan otonomi daerah secara langsung bertentangan dengan keadaan ini. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan, merupakan tujuan utama otonomi daerah.

Masyarakat saat ini sedang memasuki era baru. Tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Masyarakat adalah untuk memberikan penyangga kehidupan bagi masyarakat. Potensi ekonomi desa dapat dikembangkan untuk meningkatkan pembangunan desa dan menjadikannya sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk secara mandiri dan aktif mengembangkan lingkungannya. UU Desa menyatakan bahwa pembangunan desa mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong untuk mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan sarana dan prasarana, memaksimalkan potensi ekonomi lokal, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan memenuhi tujuan tersebut. desa. mengarusutamakan keadilan sosial dan perdamaian. Selain itu, Pasal 87 UU tersebut mengamanatkan bahwa setiap orang dipekerjakan oleh pemerintahan desa yang dibentuk dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Bagi yang sudah menguasai dunia digital, kemajuan teknis saat ini menjadi kebutuhan.

Kemajuan teknologi saat ini sangat penting bagi setiap orang untuk sukses di era digital. Fintech, yang menawarkan layanan keuangan, adalah salah satu bidang di mana teknologi berkembang pesat. Akibatnya, industri jasa keuangan telah merangkul beberapa kemajuan teknologi keuangan, termasuk metode pembayaran, instrumen pinjaman, dan penggunaan lainnya, di era digital modern. Teknologi keuangan adalah sesuatu yang secara implisit diharapkan dapat dipahami oleh semua orang. Semua orang membutuhkan landasan yang kuat dalam literasi keuangan untuk menjalani kehidupan. Salah urus keuangan atau kurangnya literasi keuangan yang menyebabkan masalah, seperti penggunaan kredit yang sembrono atau perencanaan keuangan yang tidak memadai, dapat menyebabkan banyak masalah keuangan seperti halnya kekurangan uang. Suadnyana et al. (2019).

Populasi umkm Indonesia berkembang pesat baik di perkotaan maupun pedesaan, namun literasi digital masih belum banyak digunakan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan kekayaan dan lapangan kerja di Indonesia. Usaha kecil dan menengah (UKM) mendapatkan keuntungan dari *fintech* karena teknologi memudahkan mereka untuk mendapatkan uang, meningkatkan literasi keuangan mereka, dan membantu ekspansi perusahaan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah perusahaan yang dapat dijalankan oleh satu orang atau tim kecil dan memiliki penekanan lokal atau regional. UMKM adalah cara yang teruji dan benar untuk meningkatkan perekonomian negara, dan mereka melakukannya dengan cara yang terukur dan tahan lama. Kurung Nyawa adalah salah satu desa di kecamatan Gedong Tatarn Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran Indonesia. Area seluas 2.243,51 km² dengan total populasi 546.160 jiwa, dan ada 1586,4 orang per kilometer persegi.

Dalam pengabdian ini, sejumlah *item* menjadi titik konsentrasi utama. Pertama, BUM Desa memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi kepada desa dalam bentuk Pendapatan Asli Desa, dimana laba bersih badan usaha milik desa belum diterima untuk meningkatkan pendapatan desa. Sektor unggulan belum berkembang menjadi wadah interaksi ekonomi masyarakat desa. Dapat dibayangkan bahwa pendirian BUM Desa memungkinkan pergerakan uang di sekitar kota untuk kepentingan semua lapisan masyarakat. Isu kedua adalah masalah BUM Des yang tidak produktif. BUMDes desa tidak mampu menampung unit-unit usaha desa dan belum menciptakan lapangan kerja bagi penduduk usia kerja, sehingga desa tidak terancam pengangguran. Selain itu, masalah yang dihadapi melibatkan sumber daya manusia. Rendahnya keterlibatan masyarakat menjadi penyebab tidak adanya modal sosial yang dapat meningkatkan potensi desa. BUM Desa belum berhasil berperan sebagai katalis bagi terciptanya kelompok kepentingan lokal di bidang pertanian, lingkungan, atau ekonomi produktif. Ketiga, civitas akademika dapat membantu mencari solusi atas permasalahan yang dialami BUM DESA di Desa Kurungan Nyawa. Oleh karena itu, desa Penangan Nyawa dapat memperoleh bantuan yang cukup dalam hal pengelolaan dan pengembangan ekonominya. profesor dengan keahlian di bidang ekonomi pembangunan yang dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan. bidang dengan sumber daya untuk dan penelitian tentang kelayakan bisnis. Selain itu, manajemen dapat membantu meningkatkan komersialisasi produksi unit usaha BUM DES dari perspektif ilmiah

yang sejauh ini belum menghasilkan pada kapasitas tertinggi. Selain itu, masyarakat desa Kurungan Nyawa harus diajarkan tentang motivasi kerja agar dapat menumbuhkan persepsi yang baik tentang keberhasilan BUM DES di daerah tersebut.

Daftar masalah potret Pekon berasal dari temuan penelitian Pekon. yang mencerminkan daftar masalah dengan literasi keuangan yang rendah dimiliki oleh pengusaha UMKM di Kota Bandarlampung. Dengan demikian, masalah kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas masalah pasangan adalah kemampuan yang rendah manajemen keuangan dalam perencanaan dan manajemen bisnis UMKM, sehingga usaha ini belum memiliki pengelolaan keuangan terorganisir dengan baik
2. Masalah prioritas untuk kedua mitra - daya rendah manajemen risiko bisnis yang belum dimiliki UMKM
3. Kurangnya pengetahuan mitra tentang manajemen dan perencanaan strategis penggunaan kredit yang tepat dan dengan demikian meningkatkan rasio NPL perbankan. Perbankan sebagai penyalur KUR memiliki risiko kredit selai lebih tinggi.

METODE

a. Metode dalam kegiatan kemasyarakatan

Metode kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu.

Berikut langkah-langkah strategis yang akan dilakukan:

- 1) Menyamakan pandangan tim pengembang program melalui kegiatan diskusi
- 2) Dalam situasi ini, ketua koperasi, anggota koperasi, dan Bank Lampung aktif berkoordinasi.
- 3) Bekerja sama dengan pihak lain, khususnya dalam hal ini masyarakat di Daerah Kurungan Nyawa.
- 4) Juga melaksanakan pendidikan literasi manajemen keuangan dan manajemen risiko pendidikan dalam penggunaan penyaluran kredit yang tepat
- 5) Membuat sejumlah program kerja tambahan untuk membantu tujuan program dipenuhi seefisien mungkin.
- 6) Tindak lanjut dan evaluasi secara berkala.



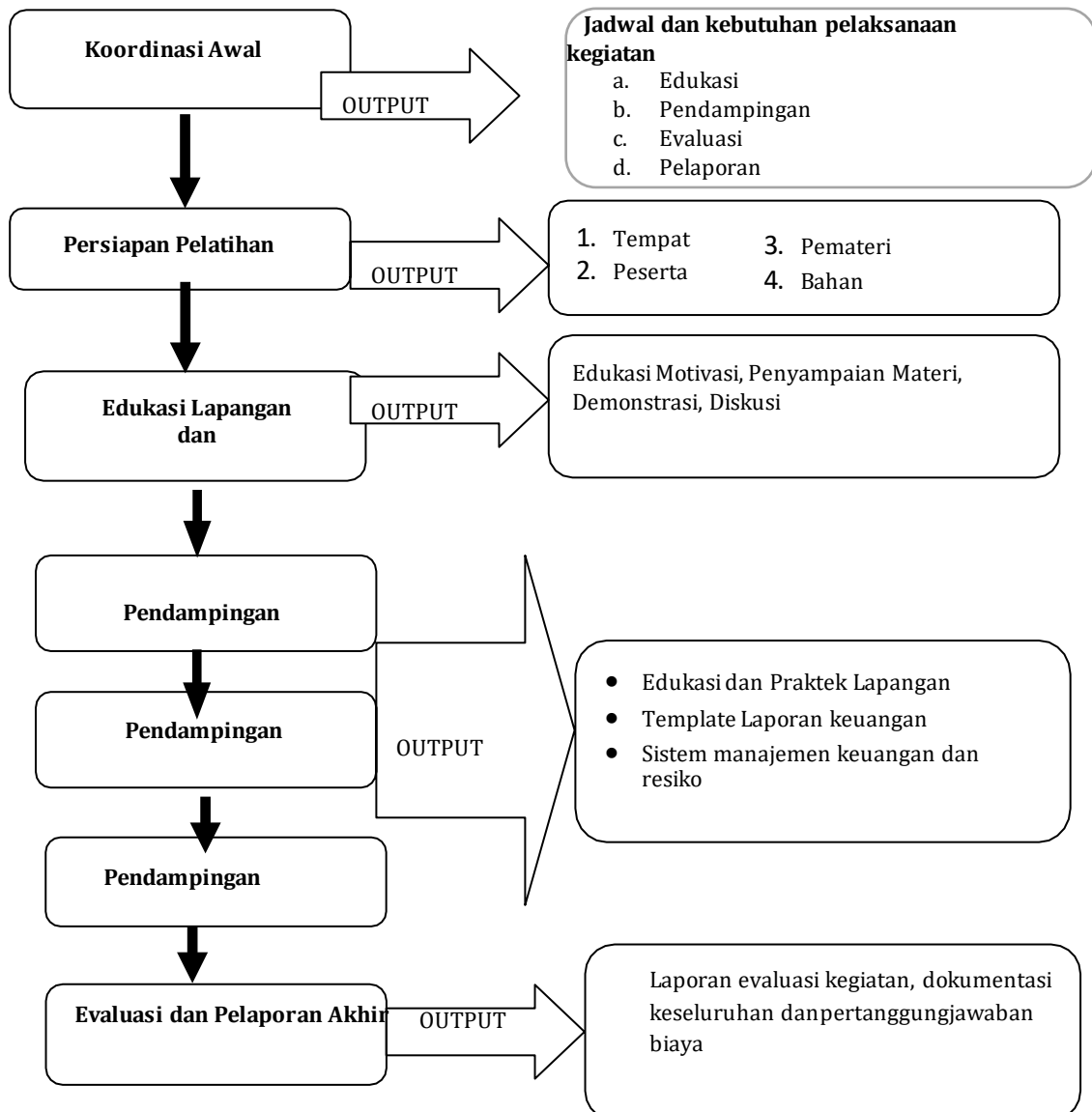
Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

Langkah-langkah yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi ini dijelaskan di bawah ini mengikuti:

1. Pelaku usaha UMKM dan BUMDes diajak menyoroti isu literasi diversifikasi produk dan strategi pemasaran selama tahap perencanaan.
2. Mengkoordinasikan eksekusi inisiatif dengan Bank Lampung dan UMKM. Dalam hal ini dilakukan koordinasi dengan para kreditur yaitu Bank Lampung, dan para debitur khususnya para anggota UMKM di BUMDES Kurung Hidup untuk mengarahkan dan mengatur kegiatan agar dapat mencapai tujuan program kegiatan dengan sebaik-baiknya.
3. Sosialisasi peningkatan keterampilan manajemen keuangan, manajemen risiko, dan penggunaan kredit. Penyuluhan diberikan melalui berbagai media, termasuk tayangan video tentang cara menggunakan perangkat lunak pelaporan keuangan dan taktik penggunaan kredit yang dapat diterima. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman pelaku bisnis UMKM terhadap keberagaman keahlian manajemen agar dapat menginspirasi untuk terus beroperasi.

b. Deskripsi kegiatan yang akan disampaikan kepada masyarakat

c. Tahapan kerja dalam mendukung metode



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masalah pertama adalah rendahnya kapasitas Life Village Series merencanakan dan melaksanakan studi kelayakan usaha BUM Des yang sudah dilakukan unit usahanya kurang mampu bertahan dan mengalami kerugian. Oleh karena itu, tim akan melakukan PkM memberikan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas Desa Kehidupan merencanakan dan melakukan studi kelayakan usaha dengan nilai literasi >75%.
2. Masalah kedua adalah masalah prioritas kedua mitra rendah produktivitas usaha karena kurangnya kemampuan mengelola unit bisnis BUM DES. Oleh karena itu, tim akan memberikan praktik lapangan untuk memperbaikinya kemampuan mengelola unit usaha BUM DES dengan nilai > 75%.
3. Masalah ketiga adalah kurangnya pengetahuan mitra tentang manajemen dan strategi administrasi dan manajemen sehingga tidak ada manajemen yang konsisten menjalankan bisnis BUM DES. Jadi Tim PkM akan mensosialisasikan pemahaman strategi manajemen dan administrasi manajemen >75%.

- a. **Jenis Kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan mitra**
 Profesor dan praktisi dalam disiplin perencanaan ekonomi dan manajemen pemasaran memiliki jenis pengalaman yang dibutuhkan untuk mengatasi setiap masalah atau tuntutan mitra. Dosen pada bidang ilmu tersebut akan menjalankan program untuk memecahkan masalah rendahnya nilai tambah dan produktivitas UMKM BUMDES di wilayah Kabupaten Pesawaran.
- b. **Tim Pengusul dan Kepakaran**

Tabel 1. Kepakaran dan Tugas Tim Pengusul

No	Nama Pengusul	Kepakaran	Tugas
1	Dr. Heru Wahyudi, S.E.,M.Si. (Ketua)	Ekonomi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan kegiatanmulai dari perencanaan, pelaksanan hingga evaluasi Berkoordinasi dengan mitramasyarakat, dan BUMDES Melakukan edukasi literasi mengenai strategi peningkatan nilai tambah dan produktifitas usaha kredit
2	Driya Wiryawan, S.E.,M.M	Managemen	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan edukasi mengenai marketing guna meningkatkan nilai tambah dan produktifitas usaha kredit
3	Ukhti Ciptawaty, S.E.,M.Si	Ekonomi Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan edukasi mengenai struktur usaha kredit

Tabel 2. Tugas Mitra

No.	Mitra	Kepakaran	Tugas
1	Aparat Pengurus Desa	Pengelolaan Pemerintah	Pendampingan BUMDES
2	Masyarakat Desa	BUMDES	Peserta pendampingan
3	Praktisi Perbankan	Bank Lampung	Pembicara

Program edukasi literasi keuangan masyarakat didukung oleh sekelompok akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam kesempatan tersebut, kegiatan dilakukan dengan bantuan tenaga ahli perbankan dari Bank Lampung. Proyek Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan karena keluarga merupakan salah satu pilar ekonomi dan pengelolaan keuangan serta literasi merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap keluarga Indonesia. Inklusi keuangan dapat dicapai jika semua strata sosial memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan keuangan. Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan pada 27 Juni 2023.

Kegiatan pengabdian ini bersamaan dengan praktisi perbankan dari BPD Provinsi Lampung serta mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Diikuti 20 peserta dari masyarakat desa, termasuk pejabat Badan Usaha Milik Desa. Tim komitmen memberikan konten tentang pengertian literasi keuangan dan produknya produk jasa keuangan, serta jenis lembaga jasa keuangan yang digunakan metode ceramah dan diskusi. Detail materi yang disajikan adalah manajemen kas, aktiva tetap, dan hutang dagang serta penyampaian materi tentang jenis-jenis lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk masalah perkreditan perbankan. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat akan lebih mampu merencanakan keuangannya, memilih produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhannya, memahami secara akurat risiko dan imbalannya, menyadari hak dan kewajibannya, serta berpikir bahwa memilih produk dan layanan keuangan yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Masyarakat Desa Mekarsari Narmada saat ini telah memiliki tingkat literasi keuangan yang cukup sehingga mampu melakukan perencanaan keuangan seefektif mungkin, memilih produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya, memahami dengan baik manfaat dan risikonya, serta menyadari hak dan kewajiban. Alat keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah aktivitas investasi pada alat keuangan yang ambigu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua orang dan organisasi yang berkontribusi secara finansial dan dengan cara lain untuk komitmen ini. Melalui pelibatan masyarakat secara langsung dalam mengidentifikasi, mengembangkan, menyikapi, dan mengatasi keadaan usaha BUMDES dan UMKM, pengabdian kepada masyarakat di LPK menawarkan pengalaman pembelajaran praktis pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat.

REFERENSI

- Achir, N., & Imran, S. (2022). Penguatan Kapasitas Desa Biluhu Timur Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 13–26. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i1.12066>
- Munawar, N. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99.
- Munzir, M. (2020). Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Bumdes Di Desa Tanjong, Kabupaten Luwu. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 21–25. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/view/628>
- Rizqi, A. R. (2019). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1021>
- SUADNYANA, I. W. S., PUTRA, I. G. S. A., & SARJANA, I. M. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (Entrepreneurship) di Dusun Langkan, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism)*, 8(1), 80. <https://doi.org/10.24843/jaa.2019.v08.i01.p09>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa